

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN MELALUI
PROGRAM USEP KM DINAS SOSIAL PROPINSI DIY DI DESA
GADINGSARI SANDEN BANTUL YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam**

Disusun Oleh:

Sugih Dina Ritanti

07230025

Pembimbing:

**Dr. Sriharini, S. Ag, M.Si
NIP. 19710526 199703 2001**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274)
552230 Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/1355/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM
USEP KM DINAS SOSIAL PROPINSI DIY DI DESA GADINGSARI SANDEN
BANTUL YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

N a m a : Sugih Dina Ritanti
Nomor Induk Mahasiswa : 07230025
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 16 Agustus 2011
Nilai Munaqasyah : A/B (Delapan Puluh Sembilan Koma Enam Enam)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH

Pembimbing

Dr. Sriharini, S. Ag, M.Si
NIP. 19710526 199703 2001

Penguji I

Pajar Hatma Indra Jaya, S.Ag. M.Si.
NIP. 198104282003121003

Penguji II

Abidah Muflihati, S.Thi. M.Si.
NIP. 1977031 720060

Yogyakarta, 07 Oktober 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah
Dekan

Prof. Dr.H.M. Bahri Ghazali, MA.
NIP. 19561123 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sugih Dina Ritanti
NIM : 07230025
Judul Skripsi : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Program USEP
KM Dinas Sosial Propinsi DIY Di Desa Gadingsari Sanden Bantul
Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali ke Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Sosial Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 02 Agustus 2011

Mengetahui,

Ketua Jurusan PMI

Dosen Pembimbing

Dr. Sriharini, S. Ag, M.Si
NIP. 197105261997032001

Dr. Sriharini, Ag, M.Si
NIP. 197105261997032001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sugih Dina Ritanti
NIM : 07230025
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Program USEP KM Dinas Sosial Propinsi DIY Di Desa Gadingsari Sanden Bantul Yogyakarta” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 28 Juni 2011

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sugih Dina Ritanti
NIM. 07230025

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Kecil ini Ananda Persembahkan Untuk:

Bapak tercinta Kodrat Tohari dan Ibu tercinta Toyibah
(Almarhumah), Kalian adalah Lentera Hatiku
“Terimakasih atas kasih sayang, do’a, air mata, harta,
tenaga, nasehat, dan waktu yang selalu tercurah setiap
saat, dan selalu menguatkan ananda dalam menapaki
hidup”,

Kakak-kakakku tercinta Mas Rujito, Mbik Indah, Mas
Haeruman, Teh Elis,
Keluarga Besar PP.Al-Luqmaniyyah,
Serta Keluarga Besar PMI Angkatan 2007
Dan Almamater Universitas Islam Negeri Sunan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Kalijaga
Yogyakarta

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“.....Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.....”

Q..S. Ar Ra'D : 11

“kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki”. (Mahatma Ghandi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Syukur yang tak terbatas dihaturkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menciptakan semua makhluknya dengan penuh kesempurnaan, sehingga dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat mereguk manisnya iman. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kemuliaannya akan senantiasa menghiasi sejarah peradaban.

Berkat segala usaha, do'a, kerja keras dan air mata akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini, dan dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis haturkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta para jajaran Pejabat Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu DR. Sri Harini S.Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan PMI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing skripsi penulis, "Terimakasih atas segala waktu, tenaga serta kesabaran dan ketelitian membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini disela-sela kesibukan Ibu".
4. Bapak Pajar Hatma Indra Jaya, M.Si selaku Dosen penguji I," terimakasih atas masukan-masukan yang diberikan".

5. Ibu Abidah Muflihah, M.Si selaku Dosen penguji II,” terimakasih atas masukan-masukan yang diberikan ”.
6. Bapak Suyanto S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. “Terimakasih atas segala masukan yang membangun”.
7. Segenap Dosen Fakultas Dakwah, yang telah memberikan dukungan serta ilmu dan pengetahuan, sehingga kami bisa seperti sekarang ini.
8. Jajaran Tata Usaha dan Pegawai Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh staf Dinas Sosial Propinsi DIY, khususnya seksi Keluarga Bermasalah Sosial yang diketuai oleh Bapak Ibnu Soleh.
10. Almarhum. Abah K.H Najib Salimi, selaku pengasuh PP. Al-Luqmaniyyah,” Terimakasih atas do’a, nasehat dan pendidikannya selama ini ”.
11. Lautan Terima Kasih Untuk Ayahanda dan Almh. Ibunda Tercinta “Terimakasih atas kasih sayang, do’a, air mata, harta, tenaga, nasehat, dan waktu yang selalu tercurah setiap saat, dan selalu menguatkan ananda dalam menapaki perjalanan hidup ini.”
12. Mas Rujito, Mas Haeruman, MbK Indah, Teh Elis, terimakasih atas do’a, motivasi dan nasehatnya selama ini. Keponakanku Sasa, Lita, Firda, kalian adalah penghibur jiwa.
13. Anak-anak kamar delapan PP. Al Luqmaniyyah: MbK Rizka, MbK Anis, Umi, Isty, Iqoh, Lia, Huly, Pelangi, fitri, terimakasih atas do’a dan suportnya selama ini.
14. Teman-teman Luqmaniyyah MbK Imas, Erna, MbK Imah, farah dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih untuk segala

cerita yang penuh tawa dan canda, terimakasih telah menemani melewati hari-hari indah di pondok.

15. Temen-temen PMI angkatan 2007; Jumer, Siti, wiwid, Indah, Latifa, Ika, Arni, Lina, Nisa, Lilik, Nurul, Halim, Yusuf, dan semuanya yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu, terimakasih telah membantu dan memberi motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan kita selama ini adalah pengalaman yang akan menjadi kenangan terindah.
16. Terimakasih juga untuk semua pihak yang selalu *mensupport* dan memberi dukungan, namun tak bisa penulis sebutkan satu persatu, mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini akan bermanfaat khususnya kepada pribadi penulis dan umumnya kepada semua pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah SWT mohon pertolongan dan perlindungan, semoga dengan ridhoNya kehidupan ini akan selalu membawa berkah dan manfaat serta cerah di masa depan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Agustus 2011

Penulis

Sugih Dina Ritanti
07230025

ABSTRAKSI

Program USEP KM milik Dinas Sosial Propinsi DIY merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang fokus terhadap masyarakat miskin. Dinas Sosial Propinsi DIY adalah suatu Lembaga yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat miskin di wilayah Yogyakarta, khususnya kaum perempuan di Dusun Patihan Desa Gadingsari sanden Bantul. Penelitian ini tentang *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Program USEP KM Dinas Sosial Propinsi DIY Di Desa Gadingsari Sanden Bantul Yogyakarta*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang wacana keilmun, terutama dalam konsep dan implementasi program USEP KM dalam pemberdayaan ekonomi kaum perempuan Dusun Patihan. Penelitian ini memaparkan tentang konsep dan implementasi program USEP KM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Dusun Patihan desa Gadingsari, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak dari Program USEP KM bagi perkembangan perekonomian masyarakat Dusun Patihan setelah menjadi anggota.

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun subyek dari penelitian ini adalah pengurus USEP KM “Patihan”, meliputi ketua, sekretaris dan bendahara serta sebagian masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Selain pengurus dan anggota USEP KM “Patihan”, Kepala seksi Keluarga Bermasalah Sosial Dinsos Prop. DIY juga menjadi subjek dari penelitian ini. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *deskriptif kualitatif*, dengan langkah setelah data terkumpul baik yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, data-data tersebut disusun kemudian di analisa dan di jelaskan.

Hasil dari penelitian ini yaitu: bahwa dalam konsep dan implementasi program USEP KM “Patihan” tidak hanya mengarah pada pertumbuhan ekonomi saja tetapi pertumbuhan dari segi sosialnya juga diprioritaskan. Hal ini ditandai dengan perkembangan kondisi kehidupan anggota USEP KM “Patihan” ke arah yang lebih baik, terbuka, partisipatoris, dan emansipatoris. Selain itu Dampak positif dari program ini yaitu munculnya kemandirian kaum perempuan anggota USEP KM “Patihan” ditandai dengan kemampuan mengembangkan usahanya.

Kata kunci: Konsep, Implementasi dan Dampak Program USEP KM, Kelompok USEP KM “Patihan” Dusun Patihan Desa Gadingsari Sanden Bantul.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s\	es dengan titik diatas
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h{	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	Ka-ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z\	ze dengan titik diatas
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es-ye
ص	Sad	s{	es dengan titik di bawah
ض	d{ad	d{	de dengan titik di bawah
ط	Ta	t{	te dengan titik di bawah
ظ	Za	z{	ze dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ -----	fath{ah	A	A
ـِ -----	Kasrah	I	I
ـُ -----	d{ammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	fath{ah dan ya	Ai	a-i
ـِـو	fath{ah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف \longrightarrow *kaifa* حول \longrightarrow *h}aula*

c. **Vokal Panjang (*maddah*):**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fath}ah dan alif	a>	a dengan garis di atas
يَ	fath}ah dan ya	a>	a dengan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
وُ	d{ammah dan wau	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → *qa>la* قيل → *qi>la*
رمى → *rama>* يقول → *yaqu>lu*

3. Ta Marbû}ah

- Transliterasi Ta' Marbu>t}ah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbu>t}ah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbu>tah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-") dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbu>t}ah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة لعطفال → *raud}atul at}fal* atau *mud}ah al-at}fal*
 المدينة المنورة → *al-Madi>natul Munawwarah*, atau *al-*
madi>natul al-Munawwarah
 طلحة → *T}alh}atu* atau *T}alh}ah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَلَ → nazzala

الْبَيْرَ → al-birr

5. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم → al-qalamu

الشمس → al-syamsu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول → Wa ma> Muhammadun illa> ra>su>l

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAKSI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	14
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	33
H. Sistematika Pembahasan.....	39
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA GADINGSARI.....	41
A. Keadaan Geografis.....	42
B. Keadaan Demografis.....	45
C. Keadaan Keagamaan.....	49
D. Keadaan Sarana dan Prasarana	50
E. Keadaan Kemiskinan	53

BAB III: KONSEP DAN IMPLEMENTASI PROGRAM USEP KM	
OLEH DINAS SOSIAL PROPINSI DIY	55
A. Dinas Sosial	55
B. Konsep USEP KM Dinas Sosial Prop. DIY	61
1. Pengertian USEP KM Dinas Sosial Prop. DIY	61
2. Tujuan & Manfaat.....	61
3. Sasaran & Garapan	64
4. Strategi, Prinsip & Pendekatan	65
5. Siklus Program.....	69
6. Pengendalian Program	70
7. Sumber & Penggunaan Dana.....	75
C. Pelaksanaan Program USEP KM Dinas Sosial Prop. DIY	81
a. Desa Gadingsari & USEP KM.....	81
b. Dukuh Patihan & USEP KM “Patihan”	82
1. Profil peserta USEP KM “Patihan”	82
2. Proses Terbentuknya Kelompok USEP KM “Patihan”	84
3. Perkembangan USEP KM “Patihan”	89
4. Pembagian Hasil USEP KM “Patihan”	95
5. Bidang-bidang Pemberdayaan	96
6. Peran Dinas Sosial Prop. DIY	100
D. Dampak Program USEP KM Bagi Perkembangan Perekonomian Masyarakat Desa Gadingsari	101
E. Analisis Hasil Penelitian	103
BAB IV : PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran-saran	108
C. Penutup	110
 DAFTAR PUSTAKA	 112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Topografi atau Bentang Lahan	44
Tabel 2. Kesuburan Tanah	44
Tabel 3. Kondisi Geografis	45
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	46
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	47
Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	49
Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Agama	50
Tabel 8. Sarana Fisik	51
Tabel 9. Sarana Transportasi	52
Tabel 10. Sarana Komunikasi	53
Tabel 11. Jumlah Penduduk Miskin	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi persawahan.....	41
Gambar 2. Kantor Kelurahan Desa Gadingsari	42
Gambar 3. Kantor Dinas Sosial Propinsi DIY.....	56
Gambar 4. Hasil Produksi USEP KM “Patihan”	91
Gambar 5. Hasil Pembuatan Tempe Kedelai	92
Gambar 6. Budidaya Jamur	93
Gambar 7. Hasil Jenis Ubi-Ubian	94



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan skripsi yang berjudul “ Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Program USEP KM Dinas Sosial Propinsi DIY di Desa Gadingsari Sanden Bantul Yogyakarta ”, maka perlu di jelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah suatu jalan atau cara untuk menjadikan orang-orang yang tidak atau kurang berdaya menjadi lebih berdaya.¹ Pemberdayaan juga mamiliki arti usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pengembangan masyarakat dilakukan dalam proses yang memberdayakan.² Sedangkan pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk memperkuat posisi ekonomi yang dimiliki masyarakat, dalam rangka menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang sehingga mampu untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada.³ Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud yaitu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam memenuhi

¹ Noor Kamilah, Empowerment, dalam “*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*”, (Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Suka, 2006), hlm. 58.

² Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 270.

³ Hani Yuliawaty, Pemberdayaan Ekonomi Buruh Gendong Wanita..., dalam “*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Populis*”, (Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Suka, 2007), hlm. 110.

kebutuhannya dengan pendampingan dan pemberian bantuan agar dapat dikembangkan oleh masyarakat guna meningkatkan kehidupan ekonomi mereka.

2. Masyarakat Miskin

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan kemiskinan menurut Suparlan, yaitu suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.⁵ Masyarakat miskin menurut Dinas Sosial Propinsi DIY adalah kelompok orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.⁶ Dari pendapat di samping dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat miskin adalah masyarakat yang tingkat keadaan materinya rendah dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam lingkungan sosialnya, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

⁴ Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung CV. Pustaka Setia, 1997), hlm. 85.

⁵ <http://kafeilmu.co.cc/tema/teori-tentang-kemiskinan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 29 maret 2011 pukul 10.33.

⁶ Departemen Sosial RI, *Pedoman Umum: Program Pemberdayaan Fakir Miskin*, (Jakarta: DEPSOS RI, 2009), hlm. 2.

Masyarakat miskin yang dimaksud disini adalah masyarakat atau ibu-ibu yang berdomisili di Dusun Patihan Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Yogyakarta, yaitu para ibu rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tingkat kesejahteraan hidupnya cenderung rendah dibandingkan masyarakat dilingkungan sosialnya. Hal ini yang dipandang perlu adanya proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Dusun Patihan Desa Gadingsari.

3. Program USEP KM Dinas Sosial Propinsi DIY

Departemen Sosial merupakan salah satu *Leading Sector* (sektor penggerak/penunjuk jalan) dalam penanggulangan kemiskinan memiliki tanggung jawab besar dalam menangani masalah kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Didasari oleh realitas kemiskinan yang ada di Yogyakarta pihak Dinas Sosial Propinsi DIY memiliki program yang secara khusus menanggulangi permasalahan kemiskinan atau kesejahteraan sosial yaitu melalui proses pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.

Salah satu program pemberdayaan Masyarakat miskin yang ada di Dinas sosial adalah program USEP KM (Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin). Program USEP KM ini yang menangani adalah Seksi Keluarga Bermasalah Sosial. Adapun yang dimaksud dengan program USEP KM adalah kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk Wanita Keluarga Binaan Sosial (WKBS), serta masyarakat lingkungannya yang dilaksanakan dengan sistem kerja kelompok melalui berbagai kegiatan keterampilan ekonomis produktif untuk mencapai tujuan program yang telah

ditetapkan. Kegiatan keterampilan produktif tidak semata-mata untuk menambah atau meningkatkan pendapatan keluarga secara materi, tetapi dapat memberikan manfaat kepada pengembangan sosial dan budaya keluarga khususnya wanita, yang pada akhirnya dapat mengatasi permasalahan keluarga maupun masyarakatnya sehingga dapat berfungsi sosial dan mampu berperan aktif dalam proses pembangunan.⁷

Berdasarkan penegasan istilah tersebut, dapat dirumuskan pengertian judul penelitian ini secara keseluruhan: suatu penelitian lapangan yang berusaha mengungkapkan dan menganalisis strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Dinas sosial Propinsi DIY melalui program USEP KM.

B. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena yang banyak diperbincangkan, dari mulai pejabat pemerintahan sampai dengan rakyat kecil. Salah satu persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah kesenjangan ekonomi yang berkepanjangan serta kemiskinan yang semakin merajalela. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekarang ini telah mengantarkan Indonesia dalam keterpurukan ekonomi. Untuk itu upaya pembangunan dan

⁷Buku Petunjuk Pelaksanaan Usaha Ekonomi Sosial Produktif Keluarga Miskin Propinsi DIY,(Dinas Sosial Propinsi DIY, 1993), hlm. 2.

pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi hal yang harus segera di upayakan dan tidak bias ditunda lagi.

Dalam hal pembangunan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek politik yang pada akhirnya berdampak pada masalah sosial. Negara sebagai satuan kerja organisatoris yang sangat efektif, terutama berkaitan dengan berbagai kegiatan yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan ekonomi yang dalam wacana nasional adalah untuk mencapai “masyarakat adil dan makmur” sesungguhnya memang meliputi banyak aspek kemasyarakatan, sehingga investasi yang dilakukan tidak hanya yang langsung bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi, seperti halnya mendatangkan modal dan teknologi dari luar negeri untuk menunjang penumbuhan usaha, melainkan juga menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan memiliki etos kerja yang tinggi.

Namun demikian, sejauh ini pembangunan masih dibicarakan dalam rangka teknis ekonomi makro –dalam arti menyangkut investasi, modal, impor-ekspor, inflasi dan sebagainya –sehingga tidak ada media untuk membahas bagaimana semua itu berproses di dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat menanggapi berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah, apalagi jika masyarakat tersebut masih tergolong tradisional dan masih memerlukan usaha transformasi sosial agar memiliki pengetahuan tentang pembangunan, untuk kemudian dapat berpartisipasi di dalamnya.

Demikianlah gambaran negara Indonesia dengan sederetan usaha pembangunannya, demi tercapainya masyarakat adil dan makmur di semua aspek kehidupan, meskipun kadang-kadang usaha tersebut kurang menyentuh terhadap masyarakat tradisional yang notabene berada dalam lingkup kemiskinan, di mana golongan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Gambaran masyarakat miskin dari dulu sampai sekarang masih sering kita jumpai. Mereka hidup apa adanya dan selalu bergelut dengan berbagai macam keterbatasan dalam usaha pemenuhan kebutuhannya. Belum lagi krisis ekonomi yang sampai sekarang belum teratasi dan masih menjadi PR bagi bangsa Indonesia. Dampak dari kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat kecil. Dengan kemampuan yang terbatas mereka harus mengikuti kenaikan berbagai harga kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat saja.

Pembahasan mengenai keterbelakangan (*underdevelopment*) mencakup masalah kemiskinan dan kesenjangan. Kendati dalam percakapan sehari-hari istilah kemiskinan acapkali dipakai silih berganti dengan kesenjangan, sebenarnya hakekat yang terkandung di dalamnya berbeda. Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehidupan (*deprivation*) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Mereka yang berada dalam kategori miskin, hidupnya serba kekurangan. Sedangkan kesenjangan adalah sebuah

kondisi dimana di dalamnya terjadi ketimpangan akses pada sumber-sumber ekonomi (*economic resources*).⁸

Hal ini juga bertentangan sekali dengan ajaran Islam yang sangat memerangi kemiskinan. Islam tidak sekedar memandang kemiskinan sebagai masalah, bahkan menganggapnya sebagai musibah yang harus dilenyapkan. Kemiskinan adalah ancaman serius bagi aqidah. Seorang ulama Salaf mengatakan “*bila seorang miskin pergi ke suatu negeri, maka kekafiran akan berkata kepadanya, bawalah aku bersamamu.*” Rasulullah saw. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Na’im dari Anas bersabda:

كاد الفقر أن يكون كفرا,,, (رواه ابو نعيم)

Artinya: ”kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran.”

Dalam riwayat Abu Dawud Rasulullah saw berdo’a mohon perlindungan dari kemiskinan dan kekafiran, seorang sahabat bertanya: “*apakah keduanya sederajat?*” Rasulullah saw, menjawab: “*ya, sederajat.*” Sayyidina Ali r.a. dalam satu statemennya yang masyhur mengatakan, “*seandainya kemiskinan itu berwujud seorang laki-laki maka aku akan membunuhnya*”.⁹

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa Islam menolak ajaran yang mengkultuskan kemiskinan. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk

⁸ Dr. Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 33.

⁹ Ainur Rofiq, “Konsep Pengenasan Kemiskinan Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi”, dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Populis*, (Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Suka, 2007). hlm. 59.

agama Islam (muslim) sudah pasti harus membuka mata terhadap permasalahan kemiskinan.

Di Indonesia masyarakat Islam sebagai penghuni mayoritas bangsa masih terlalu jauh dari segala keunggulan bila dibandingkan dengan sesama umat manusia di negara-negara lain. Dari fakta ini dituntut adanya upaya-upaya pemberdayaan yang sistematis dan terus-menerus untuk melahirkan masyarakat yang berkualitas.

Akan tetapi mewujudkan semua itu tidaklah mudah, sebab kini kita sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan salah satunya adalah ketidakadilan secara ekonomis, psikologis, intelektual, dan politis. Semua itu diakibatkan oleh kerakusan ekonomi, egoisme kekuasaan, rendahnya nilai-nilai kemanusiaan, dan robohnya nilai-nilai spiritualitas. Salah satu respon terhadap kondisi tersebut adalah dengan munculnya berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat.

Akibat dari kemiskinan yang disebabkan oleh krisis ekonomi, banyak para kepala keluarga yang terkena PHK. Akibatnya, sekarang banyak kita temui para wanita bekerja diluar rumah demi untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga sebagai buruh. Hal ini dilakukan demi membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga (mencari nafkah). Tapi yang sangat disayangkan bahwa perempuan masih saja termarginalkan bahkan menjadi objek plecehan dan kekerasan. Relitas ini dapat kita lihat dengan banyaknya kaum perempuan yang bekerja di sektor informal daripada di sektor formal. Padahal dari segi penghasilan/upah jauh lebih rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Hal ini ditandai dengan angka kemiskinan perempuan khususnya daerah Bantul yang cenderung lebih tinggi yaitu 457.012, dibandingkan dengan angka kemiskinan kaum laki-laki yaitu 454.491 jiwa. Data yang bersumber dari BPS tersebut yang mendukung adanya program USEP KM di wilayah Bantul, khususnya Dusun Patihan Desa Gadingsari. Melihat realitas ini sudah semestinya kaum perempuan mendapat perhatian dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini dilakukan agar kaum perempuan dapat aktif dan terlibat dalam proses pembangunan yaitu sebagai subjek dari pembangunan tersebut.

Padahal pada prinsipnya pembangunan manusia dan masyarakat tidak boleh membedakan jenis kelamin, sosial, ekonomi, budaya, agama, bahkan aliran politik tertentu. Pembangunan manusia yang dimaksud adalah pembangunan manusia seutuhnya tanpa harus ada diskriminasi di dalamnya.

Perempuan selalu mendapatkan peran disektor domestik, dan jika mendapat kesempatan di sektor publik pun harus menanggung beban ganda. Hal ini yang menyudutkan perempuan pada posisi dan kondisi yang tidak adil.

Melihat persoalan-persoalan tersebut memunculkan keprihatinan bagi sesama perempuan. Berangkat dari keprihatinan itulah muncul keinginan memikirkan dan menangani persoalan tersebut. Walaupun disadari, untuk mewujudkan keinginan itu tentu tidaklah mudah, karena harus berhadapan dengan tatanan sosial budaya dalam masyarakat. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh para WKBS yang tergabung dalam kelompok USEP KM “Patihan” Desa Gadingsari yang didampingi oleh Dinas Sosial Propinsi DIY. Mereka harus menanggung biaya biaya hidup keluarga, bahkan

mereka tidak pernah lagi memikirkan bahwa pekerjaan mereka sebagai buruh tani itu sangat tidak cukup. Tapi apa mau dikata faktor ekonomilah yang mendorong mereka untuk menjadi buruh tani. Melihat realita seperti itulah maka Dinas Sosial Propinsi DIY sebagai suatu lembaga yang konsen terhadap persoalan pemberdayaan masyarakat terpanggil untuk membantu para WKBS di Dusun Patihan Desa Gadingsari dalam hal meningkatkan taraf kehidupan ekonomi maupun sosial mereka.

Secara ekonomi, rata-rata mereka tergolong ke dalam masyarakat tidak mampu (miskin). Kondisi ini dapat dilihat dari bangunan rumah mereka yang pada umumnya kurang layak huni dan kurang memenuhi standar kesehatan. Selain itu juga dapat dilihat dari segi mata pencaharian para WKBS yang rata-rata adalah buruh tani dan buruh serabutan. Suatu pekerjaan yang dipandang belum memenuhi standar dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Namun dari realitas di atas, ada komunitas ibu-ibu rumah tangga di Dusun Patihan Desa Gadingsari yang sama-sama tumbuh dan berkembang dalam sebuah kelompok, yang di dalam kelompok tersebut mereka berusaha mengembangkan embrio usaha yang sudah dimiliki sebelumnya. Kelompok tersebut dinamakan dengan kelompok USEP KM "Patihan" Desa Gadingsari. Nama kelompok ini diambil dari nama suatu program yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Propinsi DIY yaitu program pemberdayaan masyarakat miskin melalui USEP KM (Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin). Mereka membentuk kelompok ini sejak tahun 1996 melalui seleksi dari pihak Dinsos sampai dengan sekarang. Salah satu faktor yang membuat kelompok dan program ini bertahan sampai sekarang adalah budaya

gotong-royong yang masih sangat kental pada masyarakat Dusun Patihan Desa Gadingsari, khususnya para ibu rumah-tangganya. Budaya gotong-royong ini pula yang mampu mengantar mereka pada kejejahteraan hidup mereka sekarang ini. Hal ini dibuktikan dengan kesibukan ibu-ibu dalam mengembangkan usahanya seperti produksi keripik bayam, keripik ketela, rempeyek, krispi jamur dan sebagainya – bahkan salah satu hasil produksi pernah mendapatkan juara pada lomba tingkat nasional di Jakarta.

Dinas Sosial Provinsi DIY melaksanakan Program Pemberdayaan masyarakat miskin di Dusun Patihan Desa Gadingsari Sanden Bantul, dengan tujuan memberikan panduan bagi instansi terkait dan masyarakat Desa Gadingsari dalam penanggulangan masalah kemiskinan di daerahnya, sehingga terdapat persamaan persepsi, kesatuan langkah, dan keterpaduan dalam pelaksanaan program. Strategi dan kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin melalui program Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP KM).

Hal di atas yang menarik perhatian penulis untuk mengungkap apa yang melatarbelakangi kegiatan tersebut serta bagaimana implementasi dan konsep serta dampak dari program USEP KM di Dusun Patihan Desa Gadingsari, khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam kelompok USEP KM “Patihan” Desa Gadingsari.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Konsep dan Implementasi Program USEP KM yang dilakukan Dinas Sosial Propinsi DIY dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Dusun Patihan Desa Gadingsari?
2. Bagaimanakah dampak program USEP KM Dinsos Propinsi DIY bagi perkembangan perekonomian masyarakat Dusun Patihan Desa Gadingsari?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menjelaskan konsep dan implementasi program USEP KM yang dilakukan oleh Dinas Sosial Propinsi DIY di Dusun Patihan Desa Gadingsari.
 - b. Untuk mengetahui dampak program USEP KM bagi perkembangan perekonomian masyarakat Dusun Patihan Desa Gadingsari.
2. Kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah :
 - a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kekayaan wacana mengenai pemberdayaan masyarakat bagi seorang pengembang masyarakat (*community development*), terutama pada bidang implementasi, selain itu juga sebagai stimulan terbentuknya dialektika wacana kritis dengan dialektika kontemporer sehingga tercipta pemahaman yang mendalam

mengenai pemberdayaan masyarakat yang partisipatoris, progresif dan kontekstual.

b. Kegunaan Praktis

Dengan melihat konsep, penerapan hasil yang dicapai dari program USEP KM, maka hasil penelitian ini akan mampu memberikan masukan dan memberikan data stimulan bagi penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama, atau dengan penelitian dengan pokok bahasan yang bersinggungan dengan penelitian ini.

Secara internal kelembagaan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif secara objektif bagi pemerintah Yogyakarta dan pemerintah Kelurahan Sanden pada khususnya, dalam mengevaluasi dampak adanya program USEP KM yang diterapkan oleh Dinas Sosial yang diterapkan di Kelurahan Sanden terhadap tingkat keberhasilannya dalam mengurangi kemiskinan, dan sebagai telaah atas efektifitas upaya yang dilakukan. Artinya apabila program ini mampu mengurangi kemiskinan maka untuk langkah selanjutnya harus dipertahankan dan ditingkatkan. Namun apabila yang terjadi sebaliknya maka harus dilakukan peninjauan ulang terkait hambatan atau kelemahan yang terjadi agar kemandirian masyarakat dapat terwujud.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat, memang sudah banyak dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya, namun penelitian yang secara khusus memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat miskin yang dikhususkan pada usaha ekonomi produktif masih relative sedikit yang ada di Fakultas Dakwah, antara lain:

1. Penelitian Sukiman “Pemberdayaan Kelompok Tani Ngudi Makmur Oleh LSM Yayasan Pengembangan Ekonomi Rakyat Indonesia (LSM YAPERINDO) di Desa Jangkar Kecamatan Teman Kabupaten Kulonprogo”. Penelitian ini menjelaskan tentang upaya pemberdayaan ekonomi kelompok tani oleh LSM YAPERINDO di Desa jangkar Kolonprogo. Adapun hasil yang di dapat dari proses pemberdayaan ini adalah meningkatnya pendapatan para petani, dibuktikan dengan usaha yang mereka miliki diluar pekerjaannya sebagai petani, seperti ternak sapi, bio gas, dan penghijauan lahan pasir.¹⁰
2. Penelitian Ida Rosyda “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat & Penanggulangan Sosial Di Kelurahan Segara Makmur Taruma Jaya Kabupaten Bekasi”. Skripsi ini membahas tentang upaya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kelurahan Segara Makmur Bekasi serta keberhasilan yang dicapai dari proses pemberdayaan

¹⁰ Sukiman, “*Pemberdayaan Kelompok Tani Ngudi Makmur Oleh LSM Yayasan Pengembangan Ekonomi Rakyat Indonesia (LSM YAPERINDO) di Desa Jangkar Kecamatan Teman Kabupaten Kulonprogo*”, skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fak. Dakwah UIN Suka, 2006.

tersebut, yaitu berupa penurunan tingkat kemiskinan di Kelurahan Segara Makmur.¹¹

3. Penelitian Syukron Munjazi “Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman Yogyakarta)”. Penelitian ini membahas tentang implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dengan hasil yang diperoleh dari adanya program tersebut yaitu berupa penurunan tingkat kemiskinan di Kelurahan Demangan.¹²

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini fokus pada konsep, implementasi serta dampak yang dihasilkan dari program pemberdayaan oleh Lembaga Pemerintah (Dinas Sosial) yaitu berupa program USEP KM, yang program tersebut dijalankan dengan menggunakan dana hibah dengan syarat membayar angsuran. Program ini telah berjalan sejak tahun 1996 sampai sekarang ini.

¹¹ Ida Rosyda, “ *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat & Penanggulangan Sosial Di Kelurahan Segara Makmur Taruma Jaya Kabupaten Bekasi* ”, skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fak. Dakwah UIN Suka, 2008.

¹² Syukron Munjazi, “ *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman Yogyakarta)* ”, skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fak. Dakwah UIN Suka, 2009.

F. Kerangka Teoritik

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju cita-cita nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹³

Sesuai dengan statemen diatas, alangkah idealnya tatanan masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Semua aspek kehidupan dapat berjalan seimbang tanpa adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya.

Keadaan masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia tidak lain adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Dilihat dari segi materialnya, berarti masyarakat berada dalam kondisi yang berkecukupan, yaitu mampu dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dilihat dari aspek spiritualnya, masyarakat sudah mampu menanamkan nilai-nilai spiritual baik secara individu maupun dalam pergaulan

¹³ http://chosenmojo.blogspot.com/2011/15/Pembangunan_Nasional.html, diakses pada 15 maret 2011 pukul 22. 15.

di masyarakat. Hal inilah yang melatar belakangi mengapa harus ada proses pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam pengembangan masyarakat (*community development*), yang dalam ilmu kesejahteraan sosial merupakan materi wajib yang harus dimiliki oleh seorang pekerja komunitas (*community worker*). Dalam perkembangannya, konsep pemberdayaan (*empowerment*) mengalami pasang surut pemaknaan, sehingga menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Meskipun demikian, berbagai kalangan telah menerima dan menggunakan konsep ini, tentu saja dalam persepsi masing-masing.¹⁴ Untuk dapat memahami konsep pemberdayaan masyarakat ini, maka penulis akan mencoba mengupas dari berbagai dimensinya, yaitu dinilai dari pengertian pemberdayaan sampai pada proses pemberdayaan itu sendiri.

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yaitu proses penyadaran masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya, sehingga mereka mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang ada di lingkungannya. Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

¹⁴ Noor Kamilah, *Empowerment*, hlm. 49.

Menurut Compton dan Mc Clusky, pemberdayaan masyarakat adalah :

“a process whereby community members come together to identify their problems and need, seek solution among themselves, mobilize the necessary resources and execute a plan of action or learning or both”(suatu proses dimana masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya, mencari pemecahan diantara mereka sendiri, memobilisasi semua sumberdaya yang ada dan menyusun rancangan tindakan untuk meningkatkan taraf hidup atau kehidupannya).¹⁵

Sementara H.M. Ya'kub mengungkapkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat (*empowering society*) mencakup tiga aktifitas penting yaitu:¹⁶

1. Membebaskan dan menyadarkan masyarakat, kegiatan ini subjektif dan memihak pada masyarakat lemah atau masyarakat tertindas dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.
2. Berupaya agar masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi.
3. Menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Mengacu pada pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membantu masyarakat agar pembangunan dapat

¹⁵ Aziz Muslim, Konsep Dasar Pengembangan Masyarakat, dalam “ *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Populis*”, (Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Suka, 2007), (Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Suka, 2007), hlm. 20.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 20.

dilakukan secara mandiri yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhannya, menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk kesejahteraan sendiri.

Perlu ditambahkan disini bahwa fungsi masyarakat adalah sebagai subjek bukan objek dari perubahan (*agen of change*), karena merekalah yang mengetahui keadaan lingkungan sosial dan permasalahan yang sedang mereka hadapi dalam rangka mewujudkan tujuan akhir proses pemberdayaan yaitu kesejahteraan sosial. Hal ini di perkuat oleh ayat al-Qur'an surat ar-Ra'du ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد: ١١)

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”¹⁷

Ayat diatas menerangkan bahwa prinsip dasar setiap perubahan atau pengembangan masyarakat, yaitu dimulai dari pribadi yang merupakan dasar seluruh bangunan. Sebab tidak mungkin membuat suatu bangunan yang aman dan kokoh jika batu pijakannya tidak kokoh alias rusak.¹⁸ Ayat ini juga berbicara mengenai dua macam perubahan dengan dua pelaku. Pertama perubahan masyarakat yang mana pelakunya adalah Allah SWT. Kedua, perubahan keadaan diri manusia yang mana pelakunya adalah manusia itu

¹⁷ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Al-Wa'ah, 1993), hlm. 370.

¹⁸ Aziz Muslim, "Paradigma Pengembangan Masyarakat", dalam buku, *Islam, Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: IISEP-CIDA, 2005), hlm. 3.

sendiri.¹⁹ Ayat ini mencerminkan kegotong-royongan suatu kaum atau masyarakat dalam usaha merubah keadaan atau kehidupan mereka. Hal inilah yang dikehendaki dari adanya pengembangan atau pemberdayaan masyarakat.

Membangun manusia adalah proses penyadaran manusia bahwa dirinya memiliki masalah, sehingga dia mengetahui bahwa dirinya memiliki masalah. Dengan menyadari dia memiliki masalah, maka dia (dengan dibantu orang lain) dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.

Lebih lanjut Paul berpendapat bahwa:

“Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Hal ini merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri.”²⁰

Hal ini senada dengan pendapat Rapport yang menyatakan bahwa:

“Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial”²¹

4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Mengetahui tujuan dari sebuah proses pemberdayaan, merupakan hal penting, karena adanya tujuan yang disepakati bersama dapat menjadi

¹⁹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kahidupan Masyarakat* cet.XII,(Bandung: Mizan, 2001), hlm. 246.

²⁰ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama, 2006), hlm. 4.

²¹ Hary Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 3.

motivasi tersendiri bagi mereka yang tidak berdaya (*powerless*) sehingga dapat turut berperan serta dalam proses pemberdayaan.

Menurut Rukmianto Adi, dalam konteks pembangunan, tujuan pemberdayaan dapat berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang digarap. Secara substansial, tujuan pemberdayaan adalah untuk menjadikan mereka yang kurang beruntung (*disadvantages*), atau yang tidak berdaya (*powerless*) dapat menjadi berdaya (*empowered*). Dengan demikian melalui pemberdayaan terjadi perubahan kondisi ke arah yang lebih baik.²²

Sedangkan menurut Swift & Levin sebagai tujuan, pemberdayaan didefinisikan sebagai kondisi akhir diperolehnya kekuasaan bagi individu, kelompok, organisasi dan komunitas.²³

Dari beberapa pendapat tersebut, kiranya dapat disimpulkan, bahwa tujuan pemberdayaan adalah sebuah kondisi yang lebih baik, dimana akses dan kontrol terhadap sumber-sumber dapat dilakukan dengan mudah tanpa adanya hambatan-hambatan personal maupun sosial. Atau dengan kata lain, yaitu terwujudnya masyarakat mandiri serta maju yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin.

²²Noor Kamillah, Empowerment, dalam “*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*”, hlm. 59.

²³*Ibid*, hlm. 59.

5. Prinsip-prinsip dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

1. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, ada prinsip-prinsip yang harus dijadikan sebagai pedoman, yaitu:²⁴

- a. Harus dilakukan secara integral, meliputi kegiatan mental spiritual-material dalam segala aspek kehidupan.
- b. Harus merupakan swadaya dan kegotong-royongan masyarakat itu sendiri, dengan bantuan yang minim dari luar.
- c. Dilaksanakan atas dasar timbal balik antara Rakyat dengan Pemerintah.
- d. Merupakan usaha yang terus menerus dan meningkat.
- e. Didasarkan atas kebutuhan masyarakat.
- f. Dilaksanakan dengan kaderisasi.

2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.

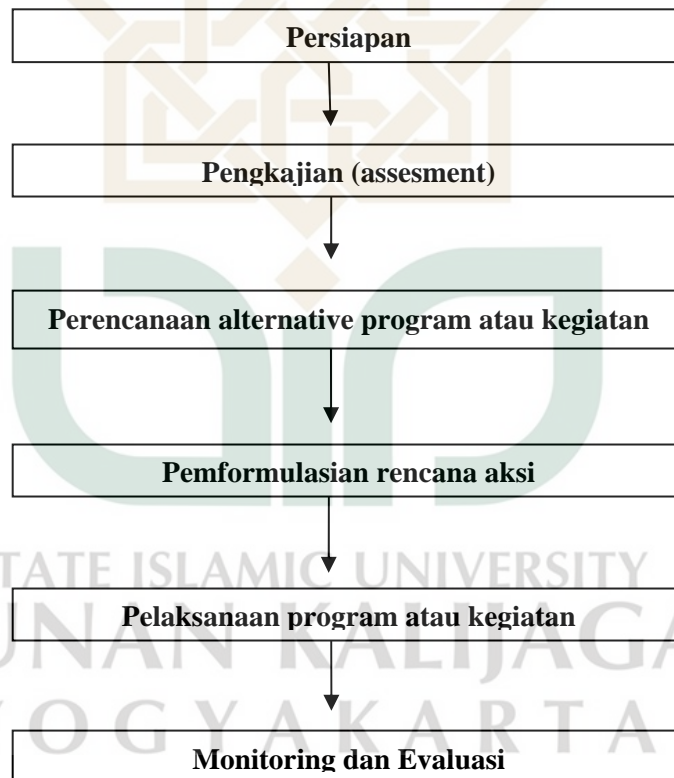
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses intervensi sosial (perubahan sosial yang terencana). Oleh karena itu setiap bentuk pemberdayaan masyarakat baik sebagai program maupun proses, dapat dijelaskan dalam beberapa tahap sebagaimana yang dikembangkan oleh Adi²⁵, terdiri dari 7 tahapan, yakni tahap persiapan (*engagement*),

²⁴ Moh. Abu Suhud, "Pendekatan Andragogi dalam Pengembangan Masyarakat", *Islam, Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: IISEP-CIDA, 2005), hlm. 29.

²⁵Noor Kamilah, Empowerment, dalam "*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*", hlm. 67.

tahap pengkajian (*assesment*), tahap perencanaan alternative program atau kegiatan (*designing*), tahap pemformulasian rencana aksi (*designing*), tahap pelaksanaan program (*implementasi*), dan tahap monev (*monitoring and evaluation*).

Skema tahapan pemberdayaan masyarakat.



6. Partisipasi dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai kegiatan dalam usaha kesejahteraan sosial, hakikat kesejahteraan (*nature of welfare*) dalam pemberdayaan masyarakat adalah

dilihat dari adanya tau tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam konteks komunitas. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci terciptanya kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, material, maupun financial diharapkan akan meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pembangunan dikomunitas tersebut.²⁶

Dengan demikian terdapat kaitan yang sangat erat antara pemberdayaan dan partisipasi. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat berperan dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, maupun transformasi budaya. Proses ini nantinya diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpihak pada rakyat dan bersifat berkelanjutan.

Dalam mewujudkan perubahan dalam proses pemberdayaan bukan hanya partisipasi masyarakat saja yang diperlukan, tetapi diperlukan juga peran serta lembaga soial atau pemerintah melalui kebijakan publik. Menurut Carl I Friedick yang dikutip oleh Riant Nugroho, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan

²⁶ *Ibid.* hlm. 70.

tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²⁷

Sedangkan Thomas R. Dey menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh Pemerintah. Kebijakan yang baik menurut beliau adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saing masing-masing dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan.²⁸ Kebijakan-kebijakan Pemerintah inilah yang nantinya akan membantu tercapainya tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu kesejahteraan sosial.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memuaskan, proses pengembangan/pemberdayaan masyarakat harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat serta lapisan pemerintah. Namun demikian, partisipasi tersebut disesuaikan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing anggota masyarakat serta kebijakan-kebijakan yang dimiliki pemerintah. Partisipasi bisa dalam bentuk keterlibatan masyarakat atau pemerintah untuk memimpin,

²⁷ Sriharini, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin", dalam buku, "*Kapita Selekta Pekerjaan Sosial*", (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Suka, 2008), hlm. 16.

²⁸ *Ibid*, hlm. 16.

memberi masukan-masukan terhadap alternative-alternatif solusi, menjadi juru runding, dan lain sebagainya.²⁹

7. Indikator Keberhasilan Suatu Proses Pemberdayaan

Pengukuran kemampuan sosial masyarakat miskin dapat difokuskan pada beberapa *key indicators* yang mencakup:

- a. Kemampuan memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*).
- b. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*).
- c. Kemampuan mengelola asset (*asset management*).
- d. Mampu menjangkau sumber-sumber (*access to resources*).
- e. Mampu berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*).
- f. Mampu dalam menghadapi tekanan dan guncangan (*cope with shock and stresses*).

Sedangkan indikator kunci yang mengukur jaringan sosial dapat mencakup:

- a. Kemampuan Lembaga Sosial memperoleh sumber daya (SDM dan finansial).
- b. Kemampuan menjalankan peran dan atau fungsi utamanya, mengelola asset, menjangkau sumber, berpartisipasi dalam program anti-kemiskinan.

²⁹ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 295.

- c. Kemampuan menghadapi goncangan dan tekanan sosial (misalnya bagaimana jaringan sosial yang ada ketika menghadapi krisis ekonomi atau bencana alam).³⁰

2. Sistem Kelompok Tanggung Renteng

Secara definisi sistem kelompok Tanggung Renteng yaitu suatu sistem yang memuat tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok, atas segala kewajiban anggota pada kelompoknya dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.³¹

Muncul 3 kata kunci dalam definisi yang perlu diperhatikan secara jeli. *Pertama*, Tanggung Jawab Bersama, dimana pada aktivitas kelompok dibangun secara bersama untuk kepentingan peraih kesejahteraan bersama. Kerjasama antar pimpinan yang dinamis dan terukur akan menentukan tingkat keberhasilan kerja yang dilakukan oleh kelompok, tentunya dalam hal ini peran anggota akan juga ikut mendominasi faktor keberhasilan yang diharapkan. Dengan kata lain kerjasama intern para pimpinan ditambah dengan kerjasama pimpinan dengan anggota akan menentukan tingkat keberhasilan dalam meraih tujuan.

Kedua, Kewajiban, dimana kewajiban adalah syarat yang harus dipenuhi apabila kita menginginkan atau memperoleh sesuatu. Didalam

³⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 147.

³¹ <http://koperasi-tanggungrenteng.com/dinamika/membentuk-kader.html>. diakses pada tanggal 05 oktober 2011 pukul 11.32.

kewajiban terkandung hal yang bisa membuat orang untuk bisa belajar tentang yang dikatakan punya harga diri atau mengabaikan serta tidak memiliki harga diri. Dalam kewajiban, orang belajar untuk tepat janji, menjaga kepercayaan dan berusaha untuk tidak mengingkari apa yang pernah dijanjikan dan disanggupi. Ini mengandung unsur pembelajaran bahwa setiap apa yang diperoleh orang selalu memunculkan konsekuensi yang harus ditanggung.

Ketiga, Keterbukaan dan Saling Percaya. Pengertian yang coba diketengahkan adalah dalam membangun jalinan kerjasama maka harus dilandasi dengan kejelasan tentang maksud tujuan serta menjaga agar kerjasama bisa dilakukan dengan baik karena setiap orang yang dapat peran terdukung aktivitasnya lebih karena tidak merasa dicurigai atau diyakini bahwa mereka bisa melakukan dengan baik.

Dari gambaran tentang jabaran difinisi, dapat dilihat bahwa Sistem Kelompok Tanggung Renteng mencoba melakukan sebuah transfer perubahan individu agar menjadi kebiasaan menetap dan pada gilirannya. Tiap individu yang terlibat proses akan memiliki karakter dasar yang kuat untuk berproses lebih lanjut, termasuk jika harus mengabdikan diri pada lembaga/kelompok dengan keberanian menerima amanah untuk menjadi pemimpin.

Dalam Sistem Kelompok Tanggung Renteng, kelompok sebagai wadah tidak berarti kalau saja tidak memiliki dinamika. Dinamika diperoleh dari aktivitas dan keterlibatan penuh dari para anggotanya dalam bertatap muka satu dengan lainnya, sehingga kelompok hendaknya dapat

mengembangkan proses belajar yang bermanfaat bagi anggotanya, di samping menyelesaikan masalah kewajiban keuangan.³²

Adapun sejarah munculnya Sistem Tanggung Renteng atau TR adalah sistem yang dikembangkan dari pola “tanggung menanggung”, yaitu pola yang sebelumnya digunakan oleh satu kumpulan arisan ibu-ibu di Malang pada tahun 1953. Ibu Mursia Zaafril Ilyas Kumpulan arisan ibu-ibu inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagi terbentuknya Koperasi Wanita Setia Budi Wanita di Malang, yang dipimpin oleh Ibu Mursia Zaafril Ilyas. Beliau pulalah yang memberi nama pola tanggung- menanggung bagi fenomena tersebut. Beliau pula yang pada gilirannya mengembangkan pola tersebut menjadi pola Tanggung Renteng dengan melalui penerapannya dalam kelompok-kelompok anggota koperasi wanita yang dibentuknya itu.

Salah satu contoh proses pengembangan sistem Tanggung Renteng Ibu Yoos Lutfi yang berlangsung secara terstruktur dan konsisten, dapat ditemukan dalam praktek aplikasi sistem TR pada Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya, yang kurang lebih, sudah 25 tahun ini menerapkan dan memantapkan sistem TR, dengan dimotori oleh Ibu Joos Siti Aisjah atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ibu Yoos Lutfi . Selama puluhan tahun sistem Tanggung Renteng telah membuktikan diri sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi kaum perempuan.

³² <http://tanggungrenteng.blogspot.com/2007/07/sejarah-tanggung-renteng.html>. diakses pada tanggal 05 oktober 2011.

Ratusan ribu perempuan telah menerima manfaat dari keberadaan sistem Tanggung Renteng, dan ratusan ribu perempuan pula sudah terentaskan dari kemiskinan.

Model simpan pinjam yang didukung oleh sistem Tanggung Renteng ini telah menjadikan para perempuan memiliki akses terhadap informasi, akses pendanaan, dan akses jenjang sosial yang lebih luas. Dengan demikian, dalam konteks tersebut, menjadi jelas bahwa sistem Tanggung Renteng tidak bisa dilepaskan dari isu tentang perempuan dan kemiskinan.³³

3. Kajian Tentang Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Sesungguhnya, peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat amat luas, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual. Namun demikian dalam hal ini peran pemerintah dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis saja yaitu masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.³⁴

Selama ini Pemerintah Indonesia telah terjebak pada sebuah paradigma bahwa pertumbuhan ekonomi identik dengan pendapatan nasional yang besar sehingga mengabaikan ekonomi rakyat. Fakta empiris menunjukkan bahwa ekonomi rakyatlah yang mampu bertahan dan menyelamatkan perekonomian

³³ <http://tanggungrenteng.blogspot.com/2007/07/sejarah-tanggung-renteng.html>. diakses pada tanggal 05 oktober 2011 pukul 11.20.

³⁴ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, (RINEKA CIPTA, 1990), hlm. 110.

nasional. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengakui eksistensi dan peran besar dari perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional.³⁵

Belajar dari kesalahan pembangunan pada masa Orde Baru, maka pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan dengan terus meningkatkan perekonomian rakyat melalui perlindungan dan pembinaan terhadap usaha kecil, menengah ataupun koperasi. Menurut F. Basir, dalam upaya memperkuat usaha mikro setidaknya diperlukan pola-pola atau terobosan yang tepat, terarah dan sesuai, terutama yang berkaitan dengan rekonstruksi aspek keuangan, investasi strategis, organisasi dan manajemen, serta rekonstruksi prinsip-prinsip pengelolaan usaha.³⁶

Mengutip pendapat Iswantoro, keberpihakan pada usaha kecil harus terus diupayakan, terutama dalam rangka penataan kembali perekonomian nasional menuju struktur ekonomi yang sehat, dimana peran dan kontribusi unit usaha kecil dan menengah. Salah satu kebijakan umum yang dapat dipakai adalah melalui alokasi kredit untuk unit usaha kecil dan menengah secara memadai. Kebijakan tersebut harus dituangkan dalam bentuk peraturan sehingga dapat menjamin terlaksananya kebijakan yang dimaksud.³⁷

³⁵ Sriharini, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin", dalam buku, "*Kapita Selekta Pekerjaan Sosial*", hlm. 17.

³⁶ *Ibid*, hal. 17.

³⁷ Sriharini, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin", hal. 18.

Dalam konteks pemerintah pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses saling terbuka, serta saling belajar untuk tumbuh berkembang secara bersama-sama.³⁸

Dalam hal ini pemerintah mempercayakannya kepada lembaga-lembaga sosial seperti Departemen Sosial, Dinas Sosial maupun LSM untuk mengatasi perkembangan ekonomi masyarakat kecil.

Dalam perkembangannya, Dinas Sosial berperan serta dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang bekerja dalam bidang pengembangan masyarakat (*Community Development*) yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah-masalah sosial (PMKS).

Berdasarkan peraturan gubernur nomor 44 tahun 2009 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas dan unit pelaksanaan teknis pada Dinas sosial, di bab II pasal 2 tugas dan fungsi Dinas, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.³⁹ Salah satu program yang dijalankan oleh Dinas Sosial adalah Program pemberdayaan ekonomi melalui USEP KM.

³⁸ <http://myamipancasetia.wordpress.com/2010/03/23/desian-> &- implementasi kebijakan, diakses pada 04 April 2011 pukul 13.42.

³⁹ Kumpulan makalah Dinas Sosial propinsi DIY, 2009.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan menunjuk lembaga-lembaga atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial (Dinas Sosial, Departemen Sosial, LSM, LSK, Badan-badan pemberdayaan, dll) untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial di masyarakat dalam meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan berdaya di sekitar keberadannya.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.⁴⁰ Maka di sini perlu penulis tentukan bagaimana cara kerja penelitian dalam skripsi ini. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-kualitatif*, yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴¹

1. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

A. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang dimana tempat data untuk variable melekat dan yang dipermasalahkan.⁴² Subjek penelitian

⁴⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 141.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 3.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 115.

dalam hal ini adalah informan yang akan dimintai informasinya mengenai objek yang diteliti. Adapun subjek penelitian itu antara lain:

- a. Seksi Keluarga Bermasalah Sosial Dinas Sosial Propinsi DIY, bidang program USEP KM.
- b. Pendamping USEP KM “Patihan” Desa Gadingsari.
- c. Kelompok USEP KM “Patihan” Desa Gadingsari.

B. Objek Penelitian

Sedangkan objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁴³ Adapun objek dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan program USEP KM Dinas Sosial Propinsi DIY dan dampak bagi masyarakat Dusun Patihan Desa Gadingsari.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview (Wawancara)

Interview (wawancara), yaitu merupakan kegiatan yang berlangsung dengan cara bertanya berdasarkan pedoman dan dialog secara mendalam kepada beberapa informan.⁴⁴ Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Pada interview semacam ini pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada informan sudah dipersiapkan secara lengkap dan cermat. Akan tetapi cara penyampaian pertanyaan

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, hlm. 16.

⁴⁴Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 103.

tersebut dilangsungkan secara bebas, sehingga tercipta suasana wawancara yang tidak terlalu formal, harmonis dan tidak terlalu kaku.⁴⁵ Metode wawancara ini adalah untuk memperoleh data tentang visi, misi, kepengurusan program USEP KM, proses pelaksanaan program USEP KM dan dampak yang didapat, khususnya pada masyarakat Dusun Patihan Desa Gadingsari.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada pihak Pemerintah setempat (Kelurahan) yaitu dengan Kepala Desa Gadingsari dan Kepala Seksi Keluarga Bermasalah Sosial Dinas Sosial Propinsi DIY. Pada wawancara ini penulis menggunakan teknik wawancara terencana. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum Desa Gadingsari dan implementasi program di Lembaga serta lapangan.

Teknik wawancara ini penulis lakukan dari mulai bulan April sampai dengan Juni 2011. Adapun kendala yang dihadapi oleh penulis sendiri yaitu sulitnya bertemu dengan anggota USEP KM “Patihan” sendiri, karena mereka sibuk dengan usaha yang sedang dikembangkannya saat ini. Hal ini pula yang mendorong penulis melakukan wawancara secara terpisah (individu). Tetapi penulis dibantu oleh Ibu Sukidjan selaku mantan Pendamping USEP KM “Patihan”, yaitu dengan memberi informasi jika kelompok USEP KM mengadakan pertemuan atau acara-acara lainnya.

⁴⁵Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 57.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴⁶ Kegunaannya adalah untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung terhadap masalah yang dianggap perlu secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. Adapun observasi ini dilakukan yaitu metode Observasi Nonpartisipan (*Nonparticipan Observation*), yaitu dengan tidak terlibat secara langsung, secara interaktif dengan objek yang diteliti.⁴⁷ Dalam observasi ini penulis mengamati secara langsung, mencatat menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang bagaimana proses pendampingan USEP KM yang dilakukan Dinas Sosial propinsi DIY serta melihat secara langsung keberhasilan program dilapangan yaitu di Dusun Patihan Desa Gadingsari Sanden Bantul. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian ini.

Teknik observasi ini penulis lakukan pada bulan Maret yaitu tanggal 25 maret 2011. Adapun kendala yang dihadapi penulis tidak begitu signifikan, karena jarak lokasi dengan wilayah Yogyakarta cukup dekat, yaitu menempuh waktu sekitar kurang lebih 2 jam. Selain itu pihak

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

⁴⁷ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 53.

Pemerintah Desa setempat juga menyambut baik kedatangan penulis ketika melakukam observasi awal.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang menggunakan data yang sudah tersedia yang berupa data verbal maupun non verbal. Misalnya data yang terdapat pada surat-surat, catatan harian, jurnal, laporan-laporan dan sebagainya untuk kelengkapan data penelitian.⁴⁸ Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendukung data lain yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data untuk melengkapi penelitian yaitu dengan membaca, mencatat data atau buku dari Dinas Sosial Propinsi DIY dan profil Dusun Patihan serta Desa Gadingsari. Dalam hal ini penulis mencatat data mengenai gambaran umum Desa Gadingsari seperti keadaan geografis, keadaan demografis dan keadaan sarana prasarana. Selain itu, penulis melakukan pengambilan gambar/dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

3. Keabsahan Data

Untuk memperoleh kebenaran penelitian, maka data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dimantapkan kebenarannya. Oleh karena itu peneliti harus bisa memilih dan menentukan

⁴⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 129.

cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Teknik Trianggulasi merupakan cara yang paling tepat digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁴⁹ Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁵⁰ Dalam penelitian ini penulis memeriksa data-data atau informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial propinsi DIY, kemudian dicocokkan dengan yang terjadi di lapangan (USEP KM “Patihan”).

4. Metode Analisis Data

Setelah data penelitian telah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data yang diduplikatnya itu. Proses analisis data yaitu menguraikan atau memisah-misahkan, atau dengan kata lain berarti “mengurai data” atau “menjelaskan data”, sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian-pengertian serta kesimpulan-kesimpulan.⁵¹ Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

⁴⁹ Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2005), hlm.330.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*,(Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 330.

⁵¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 65.

lain, sehingga mudah dipahami, dan semuanya diinformasikan kepada orang lain.⁵²

Proses menganalisa data ini penulis mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumen. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah penulis mengadakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data dari lapangan yang dibuat laporan dan laporan tersebut dirangkum dan dipilih bagian penting dan sesuai dengan masalah penelitian kemudian menyusunnya dalam satuan-satuan untuk kemudian disimpulkan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, penulis akan membagi kedalam empat bab yang berbentuk uraian dan tentu saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi; penegasan judul, latarbelakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, yaitu menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang akan mengungkap keadaan lokasi baik mengenai letak geografisnya, masyarakatnya, sumber daya alamnya, sarana dan prasarana serta organisasi masyarakatnya.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian....*, hlm. 334.

Pada bab ketiga merupakan bab inti dalam penelitian ini. Yaitu menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan pihak Dinas sosial Propinsi DIY di desa gadingsari beserta tahapan-tahapannya, faktor pendukung dan penghambat terlaksananya program, serta tanggapan dan manfaat dari adanya program tersebut.

Pada bab keempat, yaitu penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai konsep dan implementasi serta dampak dari program USEP KM Dinas Sosial Propinsi DIY dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Dusun Patihan Desa Gadingsari, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program USEP KM di Desa Gadingsari telah diimplementasikan dengan mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat partisipatoris, artinya masyarakat terlibat secara langsung dan aktif dalam memulai dan melaksanakan program pemberdayaan dari mulai sosialisasi sampai dengan pelaksanaan program tersebut. Implementasi program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan atau program yang dirancang masyarakat secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat miskin, terutama terfokus pada bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha dengan pinjaman dana bergulir dengan jumlah anggota awal sebanyak 30 orang. Tujuan dari adanya program pemberdayaan ini (USEP KM) tidak saja mengarah pada pertumbuhan ekonomi saja, namun pertumbuhan sosial juga diprioritaskan ditandai dengan adanya pengembangan kondisi kehidupan anggota USEP KM ke arah yang lebih baik, terbuka, partisipatoris dan emansipatoris.

2. Dari hasil yang penulis lihat di lapangan, program USEP KM ini memiliki dampak positif yang signifikan pada masyarakat terbukti dengan menurunnya tingkat kemiskinan pada masyarakat Desa Gadingsari. Hal ini dapat dilihat dari aspek dampak, yaitu aspek kemandirian yang ditandai dengan adanya anggota USEP KM mampu mengembangkan usahanya. Tidak hanya itu, dampak positif lainnya adalah kehidupan sosial masyarakatnya yang kini sudah mengalami peningkatan, yaitu ditandai dengan meningkatnya kebersamaan antar anggota USEP KM, Pendamping, dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, walaupun dipengaruhi oleh banyak faktor, namun sejak diterapkannya program USEP KM ini di Desa Gadingsari, kondisi masyarakat khususnya anggota USEP KM “Patihan” tidak lagi tergolong keluarga miskin dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Hal ini menjadi indikator tersendiri mengenai keberhasilan program USEP KM di wilayah tersebut yang harus dipertahankan peningkatannya.

B. SARAN

Saran yang hendak penulis ajukan, tidak lain hanya sekedar memberi masukan dengan harapan agar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat berhasil dengan baik dan berkelanjutan.

Adapun saran-saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakan upaya peningkatan dalam implementasi program USEP KM pada setiap warga masyarakat agar tingkat kemiskinan dapat ditekan pada setiap periodenya.
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus agar program ini dapat meningkatkan partisipasi semua lapisan masyarakat, dan juga harus disertai dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, bahwa kemiskinan adalah tanggung jawab bersama.
3. Dengan senantiasa menerima dan menampung pendapat dan aspirasi dari masyarakat maupun berbagai kalangan, diharapkan akan membantu meningkatkan efektifitas pelaksanaan program selanjutnya.
4. Hambatan-hambatan dalam masalah pelaksanaan program tersebut perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terkait, karena suksesnya pelaksanaan pembangunan adalah terletak pada kerjasama dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah.
5. Motivasi terhadap kelompok USEP KM harus lebih ditingkatkan lagi, agar anggota mampu dan lebih semangat dalam mengembangkan usahanya, serta dapat meningkatkan tingkat efektifitas dan produktifitasnya.
6. Pemberdayaan anggota harus terus ditingkatkan dan dikembangkan agar wargamampu mengembangkan usahanya serta dapat menikmati hasil dari usaha yang mereka miliki.

Pembangunan kesejahteraan sosial yang meliputi pembangunan yang menempatkan masyarakat yang menjadi subjek pembangunan. Pembangunan pada masa lalu lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan fisik material,

serta menempatkan masyarakat sebagai objek sehingga beresiko terjadinya dehumanisasi dari pelaku pembangunan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat menjadi aktor pembangunan yang pasif.

Selain itu juga perlu diketahui bahwa pembangunan haruslah mengaktualisasikan potensi dan budaya lokal. Model pembangunan pada masa lalu cenderung menyeragamkan model pembangunan dan mengabaikan potensi dan budaya lokal, sehingga beresiko pada sikap ketergantungan masyarakat terhadap bantuan-bantuan yang datang dari luar dan pengabaian potensi sosial ekonomi yang dimiliki. Oleh karena itu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin ini haruslah diimplementasikan dengan menggali, mempertahankan dan mengembangkan modal sosial, termasuk kearifan lokal. Nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong, lebih dioptimalkan sebagai modal dasar dalam menciptakan tanggung jawab sosial serta peningkatan kesejahteraan sosial.

C. PENUTUP

Dengan berakhirnya penelitian ini, maka penulis merasa ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah ikut berpartisipasi serta memberikan dorongan semangat berupa moril, materiil serta spiritual, atas tersusunnya tulisan skripsi ini, berkat bantuan merekalah penulis dapat menyusun dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amal baik mereka mendapat balasan yang lebih baik dari yang Maha Kuasa.

Penyusunan skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik maupun saran dari pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat menjadi wacana yang berarti bagi pembaca maupun penulis dalam mengembangkan diri pribadi pembaca dan penulis.

Akhirnya dengan harapan mudah-mudahan amal baik semua pihak yang membantu akan mendapatkan balasan dari Allah SWT amin. Sungguh tiada yang paling indah di dunia ini melainkan karunia dan anugrah dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung CV. Pustaka Setia, 1997).
- Aziz Muslim, "Paradigma Pengembangan Masyarakat" ,dalam buku, *Islam, Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*, (editor: Suisyanto, dkk), (Yogyakarta: IISEP-CIDA, 2005).
- Buku Petunjuk Pelaksanaan Usaha Ekonomi Sosial Produktif Keluarga Miskin Propinsi DIY,(Dinas Sosial Propinsi DIY, 1993).
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Al-Wa'ah, 1993).
- Departemen Sosial RI, *Pedoman Umum: Program Pemberdayaan Fakir Miskin*, (Jakarta: DEPSOS RI, 2009).
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003).
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005).
- Hani Yuliawaty, Pemberdayaan Ekonomi Buruh Gendong Wanita...,dalam " *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Populis*", (Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Suka, 2007).
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama, 2006).
- Ida Rosyda, " *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat & Penanggulangan Sosial Di Kelurahan Segara Makmur Taruma Jaya Kabupaten Bekasi* ", skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fak. Dakwah UIN Suka, 2008.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1989).
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

- Moh. Abu Suhud, "Pendekatan Andragogi dalam Pengembangan Masyarakat", *Islam, Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*, (editor: Suisyanto, dkk), (Yogyakarta: IISEP-CIDA, 2005).
- Noor Kamilah, Empowerment, dalam "*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*", (Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Suka, 2006).
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kahidupan Masyarakat* cet. XII, (Bandung: Mizan, 2001).
- Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2010).
- Sukiman, "*Pemberdayaan Kelompok Tani Ngudi Makmur Oleh LSM Yayasan Pengembangan Ekonomi Rakyat Indonesia (LSM YAPERINDO) di Desa Jangkaran Kecamatan Teman Kabupaten Kulonprogo*", skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fak. Dakwah UIN Suka, 2006.
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Sriharini, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin", dalam buku, "*Kapita Selekta Pekerjaan Sosial*", (editor: Aziz Muslim), (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Suka, 2008).
- Syukron Munjazi, "*Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman Yogyakarta)*", skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fak. Dakwah UIN Suka, 2009.
- Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, (RINEKA CIPTA, 1990).
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982).
- <http://chosenmojo.blogspot.com/2011/15/Pembangunan Nasional.html>, diakses pada 15 maret 2011 pukul 22. 15.

<http://kafeilmu.co.cc/tema/teori-tentang-kemiskinan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 29 maret 2011 pukul 10.33.

<http://myamipancesetia.wordpress.com/2010/03/23desian-&-implementasi-kebijakan>, diakses pada 04 April 2011 puku 13.42.

<http://tanggunrenteng.blogspot.com/2007/07/sejarah-tanggung-renteng.html>, diakses pada tanggal 05 oktober 2011 pukul 11.20.

<http://koperasi-tanggunrenteng.com/dinamika/membentuk-kader.html>, diakses pada tanggal 05 oktober 2011 pukul 11.32.

[http://yogyakarta.bps.go.id/brs/berita-resmi-statistik.1 Juli 2009.html](http://yogyakarta.bps.go.id/brs/berita-resmi-statistik.1%20Juli%202009.html), diakses pada tanggal 05 Oktober 2011 pukul 12.05.